

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **1.1 Latar Belakang**

*ASEAN Village Network (AVN)* adalah program kolaborasi antar negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi pedesaan melalui peningkatan konektivitas, pertukaran pengalaman, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Program ini menjadi langkah konkret dalam mendukung integrasi ekonomi regional ASEAN sekaligus menjawab tantangan ketimpangan ekonomi antar wilayah, khususnya di pedesaan. Berdasarkan laporan ASEAN Secretariat (2023), AVN mendorong desa-desa di kawasan ASEAN untuk mengembangkan potensi ekonomi melalui sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata berbasis komunitas, dan usaha kecil-menengah. Namun, penerapannya di Indonesia masih dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang perlu dikelola secara strategis agar hasilnya maksimal.

Faktor internal mencakup hambatan dari dalam negeri yang menghambat efektivitas program AVN. Pertama, keterbatasan infrastruktur dasar masih menjadi masalah utama di banyak desa di Indonesia. Kementerian Desa PDTT (2023) mencatat bahwa masih banyak desa yang belum memiliki akses jalan memadai, jaringan listrik stabil, dan infrastruktur komunikasi yang mumpuni.

Akibatnya, mobilitas barang dan orang yang menjadi kunci aktivitas ekonomi menjadi terhambat. Kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di pedesaan menjadi tantangan serius. Tingkat pendidikan yang rendah

dan minimnya pelatihan keterampilan teknis membuat masyarakat desa kesulitan bersaing di pasar ekonomi regional. Ketiga, masalah tata kelola pemerintahan desa juga menjadi penghambat. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa, serta praktik birokrasi yang kurang efektif, sering kali menyebabkan program pembangunan desa berjalan kurang optimal.

Di sisi lain, faktor eksternal lebih berkaitan dengan dinamika ekonomi dan politik regional yang memengaruhi keberhasilan AVN. Pertama, persaingan ekonomi antar negara ASEAN membuat koordinasi kebijakan pembangunan pedesaan sering kali tidak selaras. Setiap negara memiliki agenda prioritas sendiri, sehingga kolaborasi regional terkadang terhambat. Kedua, liberalisasi perdagangan dalam kerangka *ASEAN Economic Community (AEC)* mendorong desa-desa untuk meningkatkan daya saing produk mereka agar bisa bersaing di pasar ASEAN. Sayangnya, menurut Asian Development Bank (2023), desa-desa di negara berkembang masih kesulitan dalam hal akses teknologi, inovasi, dan peningkatan kualitas produk. Ketiga, minimnya dukungan finansial dan teknologi dari pihak eksternal seperti sektor swasta dan organisasi internasional menjadi tantangan lain yang dihadapi desa-desa untuk memaksimalkan potensi mereka di pasar regional.

Dalam perspektif teori ekonomi politik internasional, seperti yang dijelaskan oleh Robert Gilpin (2001), program seperti AVN hanya bisa berhasil jika ada keseimbangan antara kepentingan negara, struktur ekonomi yang mendukung, serta peran aktif dari aktor-aktor non-negara seperti masyarakat lokal dan sektor swasta. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan

utama harus memastikan pembangunan infrastruktur desa berjalan optimal, meningkatkan kualitas SDM melalui program pelatihan berkelanjutan, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan desa agar lebih transparan dan efektif. Di sisi lain, dukungan dari pihak eksternal seperti investasi teknologi, akses pasar, dan pendanaan sangat diperlukan untuk membantu desa-desa agar mampu bersaing di tingkat regional.

Untuk mencapai tujuan ini, pendekatan yang integratif dan kolaboratif menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah Indonesia harus lebih fokus pada pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat desa, dan mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan desa. Sementara itu, di tingkat regional, negara-negara ASEAN perlu memperkuat koordinasi untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan pedesaan dan membuka akses yang lebih luas terhadap teknologi serta pendanaan. Dengan sinergi yang baik antara berbagai pihak, AVN dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi pedesaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Lebih jauh, keberhasilan AVN juga dapat berkontribusi pada integrasi ekonomi regional ASEAN dan menciptakan model pembangunan desa yang bisa diadopsi oleh negara-negara lain di kawasan.

Selain itu, implementasi AVN juga didasarkan pada berbagai aturan dan regulasi yang berlaku baik di tingkat nasional maupun regional. Di tingkat nasional, Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan hukum utama dalam pengelolaan pembangunan desa di Indonesia. UU ini mengatur tentang kewenangan desa, perencanaan pembangunan, pengelolaan

keuangan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa, meskipun UU Desa lebih berfokus pada desa, dalam praktiknya, AVN juga melibatkan kelurahan, yang memiliki struktur administrasi berbeda tetapi tetap berkontribusi dalam program ini. Regulasi ini memberikan desa otonomi untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Selain itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDDT) juga memiliki sejumlah kebijakan turunan seperti Peraturan Menteri Desa tentang penggunaan Dana Desa yang bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan.

Dari sisi ekonomi, ASEAN Village Network (AVN) memiliki peluang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan sekaligus meningkatkan peran desa dalam perekonomian nasional serta integrasi ekonomi di kawasan ASEAN, selain desa, beberapa kelurahan di Indonesia juga turut serta dalam AVN, sebagaimana yang terjadi di Kota Batu, Jawa Timur, di mana terdapat 19 desa dan 5 kelurahan yang berpartisipasi dalam pertemuan AVN 2024. Program ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi ekonomi desa dengan cara meningkatkan produktivitas, memperluas konektivitas, serta membuka akses pasar di tingkat regional dan global. Kendati demikian, implementasi program ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan hambatan struktural.

Desa-desanya di Indonesia kaya akan sumber daya alam dan warisan budaya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi komoditas

unggulan. Berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, peternakan, hingga pariwisata berbasis komunitas dapat menjadi motor penggerak ekonomi jika dikelola secara optimal. Produk-produk seperti kopi, kakao, serta kerajinan tangan memiliki nilai ekonomi yang kompetitif di pasar regional maupun internasional, terutama jika didukung dengan teknologi pengolahan yang lebih modern dan jaringan pemasaran yang luas. Selain itu, potensi pariwisata komunitas seperti ekowisata dan wisata budaya dapat menarik investasi dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Dalam upaya mendorong produktivitas desa, AVN berfokus pada peningkatan daya saing ekonomi melalui inovasi dan peningkatan kapasitas. Kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja akibat keterbatasan teknologi serta minimnya keterampilan teknis masyarakat desa. Modernisasi teknologi, pelatihan keterampilan, serta optimalisasi rantai nilai produksi menjadi elemen kunci untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil produksi. Melalui kolaborasi regional dalam AVN, desa-desa dapat memanfaatkan akses terhadap teknologi dan pengetahuan dari negara-negara ASEAN lainnya untuk mendorong peningkatan produktivitas mereka.

Dalam konteks integrasi ekonomi regional melalui ASEAN Economic Community (AEC), AVN menawarkan peluang besar bagi desa-desa di Indonesia untuk memasarkan produk unggulannya di pasar yang lebih luas. Dengan kebijakan perdagangan bebas di kawasan ASEAN, desa memiliki kesempatan untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Namun, tantangan seperti rendahnya standar kualitas produk, keterbatasan jaringan pemasaran,

dan distribusi masih menjadi hambatan utama. Dukungan dari pemerintah dan sektor swasta sangat diperlukan untuk membantu desa meningkatkan kualitas produk, memperluas akses pasar melalui platform digital, dan menjalin kerja sama perdagangan lintas negara.

Walaupun memiliki prospek yang menjanjikan, pengembangan ekonomi desa melalui AVN masih menghadapi sejumlah kendala struktural. Kurangnya infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan konektivitas digital menjadi penghambat utama dalam mendukung kegiatan produksi dan distribusi. Di sisi lain, terbatasnya akses pendanaan menyulitkan desa untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ketergantungan ekonomi desa pada sektor pertanian tradisional juga membuat mereka rentan terhadap fluktuasi harga dan perubahan iklim. Diversifikasi ekonomi menjadi strategi penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi desa.

Berdasarkan perspektif ekonomi pembangunan yang dikemukakan oleh Michael Todaro, pembangunan ekonomi desa tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga pengentasan kemiskinan, peningkatan produktivitas, dan perluasan akses ekonomi. Oleh karena itu, implementasi AVN harus difokuskan pada upaya pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur, modernisasi teknologi, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Dengan langkah tersebut, desa dapat berkembang menjadi unit ekonomi yang mandiri, produktif, dan berdaya saing di pasar regional.

Secara keseluruhan, AVN memberikan peluang signifikan bagi desa-desa di Indonesia untuk tumbuh dalam konteks ekonomi ASEAN. Dengan pengelolaan yang tepat, seperti penyediaan infrastruktur memadai, pengembangan sumber daya manusia, serta dukungan dari sektor publik dan swasta, desa dapat mengoptimalkan potensinya. Keberhasilan program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi juga memperkuat integrasi ekonomi ASEAN serta menjadikan desa sebagai penggerak utama ekonomi kawasan.

Dari sudut pandang politik, ASEAN Village Network (AVN) memiliki potensi besar dalam memperkuat hubungan antar negara-negara ASEAN serta mendukung tujuan integrasi politik dan pembangunan kawasan yang inklusif. Program ini, yang melibatkan kerja sama antara desa-desa di berbagai negara ASEAN, tidak hanya berfokus pada pengembangan ekonomi, tetapi juga pada pemerintahan desa dan hubungan antar negara. AVN berfungsi sebagai sarana diplomasi pembangunan yang mempererat kerja sama antarnegara ASEAN dan mendukung visi kawasan untuk menciptakan stabilitas politik dan sosial, selain itu, partisipasi kelurahan dalam AVN mencerminkan inklusivitas program ini dalam menjangkau berbagai unit pemerintahan lokal, bukan hanya desa, tetapi juga daerah yang lebih urban dengan struktur administrasi yang berbeda.

Secara politis, AVN memainkan peran penting dalam mendorong diplomasi pembangunan antar negara ASEAN. Melalui inisiatif ini, Indonesia dan negara-negara lainnya di ASEAN dapat saling berbagi pengalaman serta

pengetahuan dalam mengembangkan desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Kerja sama yang terjalin memungkinkan negara-negara ASEAN untuk bersama-sama mengatasi isu-isu utama, seperti kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dengan demikian, AVN juga berpotensi memperkuat peran pemerintah desa dalam pengambilan keputusan politik lokal, yang pada gilirannya mendukung stabilitas politik di kawasan ini.

Lebih lanjut, AVN memberikan kesempatan bagi desa-desa untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam proses politik baik di tingkat nasional maupun regional. Program ini memungkinkan desa-desa untuk memperkuat kapasitas pemerintahannya, merancang kebijakan publik yang lebih efektif, dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan yang lebih luas. Penguatan pemerintahan desa berpotensi mengurangi ketimpangan antara pusat dan daerah serta mendukung desentralisasi kekuasaan yang lebih efisien. Peningkatan partisipasi politik masyarakat desa juga dapat mendorong keterlibatan yang lebih aktif dalam proses demokrasi, yang pada gilirannya memperkuat stabilitas politik di tingkat nasional dan regional.

Keberhasilan AVN sangat tergantung pada peran aktif pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam mendukung kebijakan dan implementasi program ini. Pemerintah Indonesia, misalnya, perlu memastikan adanya keselarasan antara kebijakan pembangunan desa dengan pelaksanaan AVN. Penyediaan anggaran yang memadai untuk pembangunan infrastruktur desa serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia sangat penting untuk

keberhasilan program ini. Dukungan kebijakan yang memperkuat kerja sama antar negara ASEAN juga harus diperhatikan agar implementasi program ini dapat berjalan lancar di tingkat regional. Namun, tantangan politik tetap ada dalam pelaksanaan AVN. Perbedaan kebijakan antara negara-negara ASEAN dapat mempengaruhi efektivitas kerja sama antar desa. Selain itu, adanya ketimpangan dalam kapasitas pemerintahan desa di masing-masing negara bisa menghambat pencapaian tujuan AVN. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara ASEAN untuk menyelaraskan kebijakan mereka dan memastikan adanya komitmen politik yang kuat dari masing-masing pemerintah agar program ini dapat terlaksana dengan sukses.

Secara keseluruhan, AVN juga menggambarkan upaya diplomasi multilateral yang dilakukan oleh ASEAN untuk memperkuat posisi kawasan di tingkat global. Program ini menunjukkan bahwa pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menjadi perhatian tidak hanya bagi negara-negara maju, tetapi juga negara-negara berkembang. Dengan demikian, AVN berpotensi memperkuat citra ASEAN sebagai kawasan yang solid dan komit terhadap pembangunan berkelanjutan, baik di dalam kawasan maupun dalam hubungannya dengan negara-negara lain.

Secara umum, AVN memberikan peluang besar bagi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kerja sama dalam mendukung pembangunan desa serta memperkuat stabilitas politik kawasan. Dengan diplomasi pembangunan yang tepat, penguatan partisipasi politik masyarakat desa, serta dukungan kebijakan dari pemerintah, AVN dapat menjadi instrumen penting

dalam menciptakan politik yang lebih inklusif. Namun, tantangan terkait perbedaan kebijakan antar negara dan ketimpangan pemerintahan desa perlu dikelola dengan baik agar program ini dapat sukses dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat desa di seluruh ASEAN.

Aspek ekonomi dan politik dalam ASEAN Village Network (AVN) saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan. Dari perspektif ekonomi, AVN memberikan peluang untuk meningkatkan produktivitas desa melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, modernisasi teknologi, dan perluasan akses pasar. Dengan meningkatkan daya saing desa di pasar regional dan global, program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta berkontribusi pada integrasi ekonomi ASEAN. Penguatan sektor-sektor seperti pertanian, pariwisata berbasis komunitas, dan UMKM, dapat membantu desa-desa memanfaatkan sumber daya mereka secara maksimal, mengurangi ketimpangan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan.

Di sisi lain, aspek politik memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan implementasi AVN. Pemerintah yang berkomitmen untuk mendukung kebijakan pembangunan desa yang inklusif dan mendukung integrasi ekonomi regional sangat diperlukan untuk mewujudkan potensi AVN. AVN juga berperan dalam memperkuat diplomasi antarnegara ASEAN melalui kerja sama yang erat dalam pembangunan desa. Peningkatan partisipasi politik di tingkat desa, penguatan kapasitas pemerintahan lokal,

serta desentralisasi kekuasaan dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa. Dengan adanya dukungan politik yang kuat, program ini dapat lebih efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berdampak positif bagi desa dan memperkuat integrasi politik di kawasan ASEAN.

## **1.2 Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada peran *ASEAN Village Network (AVN)* dalam mendukung pembangunan desa di Indonesia, terutama dalam aspek ekonomi dan politik. Secara spesifik, penelitian ini menganalisis potensi AVN dalam meningkatkan produktivitas ekonomi desa, memperluas akses produk desa ke pasar regional dan global, serta memperkuat kapasitas pemerintahan desa melalui kerja sama regional di bawah kerangka ASEAN. Penelitian ini membatasi kajian pada desa-desa di Indonesia yang terlibat dalam program AVN, dengan penekanan pada potensi, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam implementasi program ini. Aspek ekonomi yang dibahas mencakup pengelolaan sumber daya alam, diversifikasi produk unggulan desa, modernisasi teknologi, dan penguatan UMKM, sementara aspek politik difokuskan pada penguatan tata kelola desa, desentralisasi, dan diplomasi pembangunan antar negara anggota ASEAN.

Tantangan yang dibahas dalam penelitian ini mencakup hambatan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya konektivitas digital, dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia di pedesaan. Penelitian juga menyoroti pentingnya peran pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan

dukungan kebijakan, pendanaan, dan koordinasi yang diperlukan untuk keberhasilan AVN. Penelitian ini tidak mencakup analisis mendalam tentang kondisi desa di negara-negara anggota ASEAN lainnya atau isu-isu global di luar konteks pembangunan desa di Indonesia. Dengan demikian, batasan ini dirancang untuk memastikan fokus penelitian pada relevansi dan implementasi program AVN dalam konteks Indonesia serta hubungannya dengan integrasi ekonomi dan politik kawasan ASEAN.

**Penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:**

1. Bagaimana peran *ASEAN Village Network (AVN)* dalam mendorong pembangunan ekonomi desa di Indonesia?
2. Bagaimana AVN dapat memperkuat pemerintahan desa dan mendukung integrasi politik kawasan ASEAN?

**1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

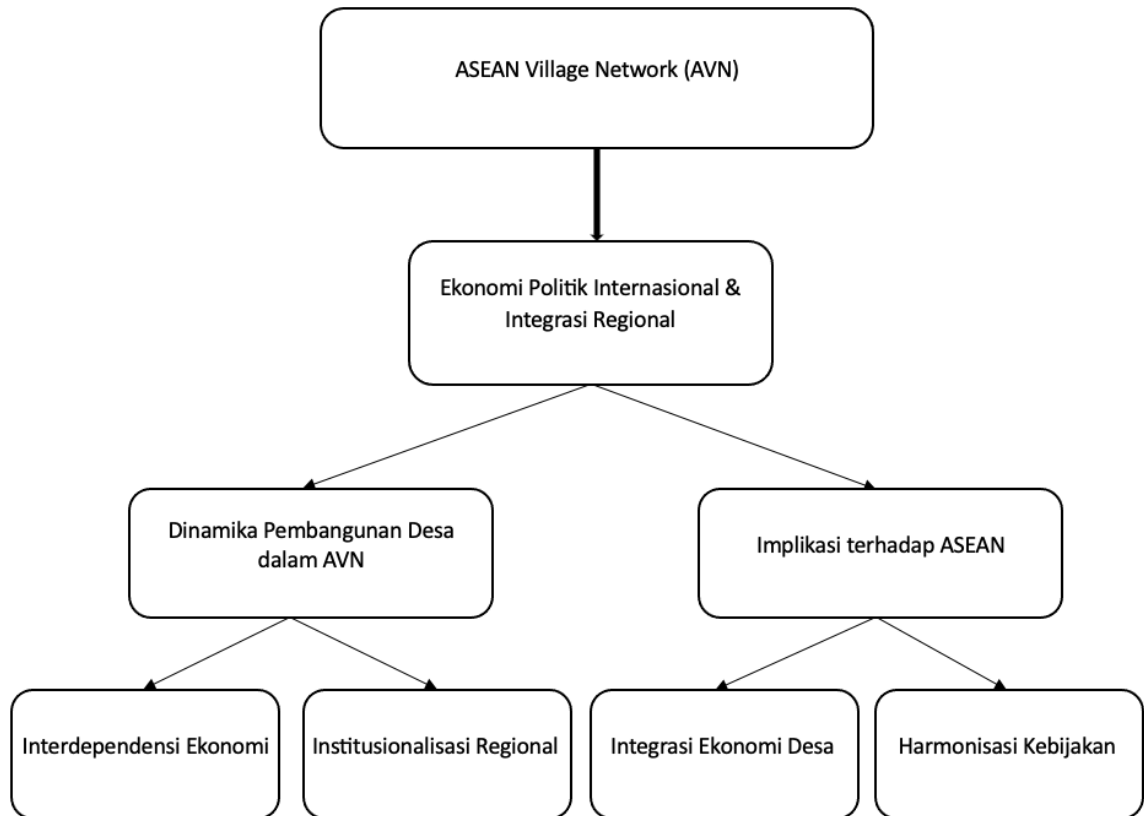
1. Menganalisis peran *ASEAN Village Network (AVN)* dalam mendukung pembangunan ekonomi desa di Indonesia, khususnya dalam hal peningkatan produktivitas, diversifikasi produk unggulan, dan akses pasar di tingkat regional.
2. Mengkaji bagaimana AVN berkontribusi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa serta mendukung integrasi politik di kawasan ASEAN melalui kerja sama antar negara.

Secara khusus, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana kerja sama regional dapat mendukung pembangunan desa, serta kontribusinya terhadap integrasi ekonomi dan politik di ASEAN.
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah Indonesia dan pihak terkait lainnya dalam menyusun kebijakan pembangunan desa yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis pada kerja sama regional melalui program AVN.
3. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya literatur akademis terkait pembangunan desa, integrasi kawasan, serta kerja sama regional dalam konteks ASEAN.
4. Dengan mengidentifikasi potensi, tantangan, dan peluang dalam pelaksanaan AVN, penelitian ini dapat membantu desa-desa di Indonesia mengoptimalkan manfaat program tersebut untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh.

## 1.4 Kerangka Konseptual

**Bagan 1 Kerangka Konseptual**



(Sumber: Penulis, 2025)

### 1. Teori Ekonomi Politik Internasional

Teori Ekonomi Politik Internasional (EPI) adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara ekonomi dan politik dalam hubungan internasional, serta bagaimana kebijakan ekonomi negara dipengaruhi oleh faktor domestik dan global. EPI menekankan pada pemahaman tentang bagaimana kekuatan politik, aktor internasional, serta dinamika ekonomi global memengaruhi keputusan kebijakan negara dalam konteks hubungan internasional. Salah satu komponen utama dalam teori ini adalah interaksi antara kebijakan ekonomi domestik negara

dengan tantangan global yang lebih luas, termasuk globalisasi ekonomi, hubungan perdagangan antarnegara, serta kekuatan pasar internasional. Dalam konteks *ASEAN Village Network (AVN)*, teori EPI memberikan wawasan tentang bagaimana negara-negara ASEAN merumuskan kebijakan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi desa, sambil mempertimbangkan interaksi regional dan global.

AVN bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi desa di ASEAN dengan fokus pada pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kebijakan ekonomi yang inklusif. Dalam hal ini, pembangunan infrastruktur, seperti konektivitas transportasi dan komunikasi antar desa, memainkan peran penting dalam mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Dengan meningkatkan akses ke pasar regional dan global, desa-desa dapat meningkatkan potensi ekonomi mereka, mendistribusikan barang dan jasa lebih efisien, serta memperkuat daya saing mereka di tingkat global. Selain itu, penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas desa dalam beradaptasi dengan tuntutan ekonomi global yang semakin kompetitif. Dalam kerangka EPI, kebijakan-kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pengembangan kapasitas domestik, tetapi juga pada bagaimana desa-desa di ASEAN dapat berperan aktif dalam ekonomi global, sekaligus menjaga keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di setiap negara anggota ASEAN. Negara-negara

ASEAN perlu merumuskan kebijakan yang memperhitungkan kebutuhan domestik mereka untuk pembangunan ekonomi desa, sambil mengelola dinamika politik dan ekonomi yang lebih luas di tingkat regional dan internasional.

Selain aspek pembangunan desa, kebijakan ekonomi yang inklusif merupakan aspek penting dalam EPI, yang berfokus pada pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi antar negara dan antar daerah dalam suatu negara. Dalam kerangka AVN, kebijakan ekonomi inklusif bertujuan untuk memastikan bahwa keuntungan dari pembangunan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh kota-kota besar atau negara-negara dengan ekonomi maju, tetapi juga oleh desa-desa yang sering kali tertinggal. Hal ini mencerminkan bagaimana negara-negara ASEAN berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan domestik mereka dalam memperkuat perekonomian desa dengan tekanan untuk tetap bersaing di ekonomi global yang semakin terintegrasi. Kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan ini sangat penting untuk menciptakan ekonomi desa yang tidak hanya mandiri, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi regional ASEAN secara keseluruhan.

Dalam teori Ekonomi Politik Internasional, Robert Cox adalah salah satu tokoh utama yang mengembangkan konsep-konsep penting yang relevan dalam konteks AVN. Cox mengemukakan bahwa hubungan antara negara dan ekonomi global tidak dapat dipahami hanya

dengan melihat kekuatan domestik negara tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial global dan interaksi antar aktor internasional. Ia mengidentifikasi tiga level analisis dalam EPI: pertama, struktur sosial global, yang merujuk pada hubungan global antara negara-negara dan aktor lainnya seperti perusahaan multinasional serta lembaga internasional; kedua, aktivitas negara dan aktor non-negara, yang mengacu pada bagaimana negara berperan dalam pengambilan kebijakan internasional, sementara aktor non-negara seperti perusahaan dan organisasi internasional juga berperan dalam membentuk kebijakan tersebut; ketiga, hegemoni, yang mencakup upaya negara dan aktor internasional untuk memperoleh kontrol atau dominasi atas sumber daya dan ideologi dalam sistem internasional. Dalam konteks AVN, teori Cox memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana negara-negara ASEAN berusaha untuk mengelola kebijakan ekonomi domestik mereka dalam menghadapi globalisasi dan interaksi dengan aktor internasional. Negara-negara ASEAN tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan dan tantangan domestik, tetapi juga oleh keterkaitan ekonomi global yang lebih besar, yang mencakup perubahan pasar internasional, peran perusahaan multinasional, dan kebijakan yang diterapkan oleh lembaga internasional.

Lebih lanjut, teori Cox menjelaskan bahwa globalisasi telah mengubah cara negara-negara merumuskan kebijakan ekonomi domestik, yang semakin dipengaruhi oleh hubungan internasional dan

kekuatan ekonomi global. Dalam kerangka AVN, analisis Cox membantu memahami bagaimana kebijakan pemberdayaan ekonomi desa harus menanggapi faktor-faktor eksternal, seperti kebijakan dari lembaga internasional (misalnya, Bank Dunia atau IMF), yang dapat memengaruhi alokasi dana dan pengambilan keputusan dalam pembangunan desa. Negara-negara ASEAN perlu mempertimbangkan dampak globalisasi dan ekonomi internasional dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik untuk pengembangan desa, tetapi juga beradaptasi dengan tuntutan ekonomi global dan menjaga integrasi dengan pasar internasional. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan melalui AVN harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan domestik untuk pembangunan desa dan tuntutan untuk berpartisipasi dalam ekonomi global yang semakin terhubung.

## **2. Integrasi Regional**

Integrasi regional merupakan proses di mana negara-negara dalam suatu kawasan membentuk kerja sama yang lebih erat untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan politik bersama. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat daya saing kawasan dalam sistem internasional. ASEAN sebagai organisasi regional telah menerapkan berbagai inisiatif untuk memperkuat integrasi di kawasan Asia Tenggara, salah satunya melalui ASEAN Village Network (AVN). AVN

berfokus pada pemberdayaan desa sebagai bagian dari upaya menciptakan konektivitas ekonomi dan sosial di antara negara-negara ASEAN.

Dalam memahami integrasi regional ASEAN melalui AVN, teori neofungsionalisme yang dikembangkan oleh Ernst B. Haas menjadi relevan. Neofungsionalisme menjelaskan bahwa integrasi tidak terjadi secara langsung dalam semua sektor, tetapi melalui mekanisme spillover effect, di mana keberhasilan kerja sama di satu bidang akan mendorong integrasi di bidang lain. Dalam konteks AVN, kerja sama dalam pembangunan ekonomi desa, seperti peningkatan infrastruktur, pelatihan tenaga kerja, dan pengembangan akses pasar regional, dapat menciptakan efek berantai yang memperkuat integrasi ASEAN secara lebih luas. Ketika desa-desa di ASEAN semakin terhubung, kebutuhan untuk koordinasi kebijakan dalam perdagangan, investasi, dan pembangunan berkelanjutan juga akan meningkat, sehingga memperdalam integrasi di tingkat regional.

Selain itu, neofungsionalisme juga menekankan peran aktor-aktor non-negara, seperti komunitas lokal, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, dalam mempercepat integrasi. Dalam konteks AVN, partisipasi aktif masyarakat desa dan dukungan dari berbagai lembaga regional dapat mendorong inovasi dalam pembangunan desa serta memperkuat keterhubungan antarnegara. Dengan demikian, AVN tidak hanya menjadi inisiatif pembangunan lokal, tetapi juga bagian dari strategi

integrasi ASEAN yang lebih luas, di mana kerja sama ekonomi desa dapat menjadi fondasi bagi konektivitas dan harmonisasi kebijakan di tingkat kawasan.

## **1.5 Metode Penelitian**

Untuk melakukan penelitian tentang "Analisis Ekonomi Politik Terhadap *Asean Village Network*" Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2013) adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena secara detail dan akurat. Penelitian ini menggunakan metode ilmiah untuk menggambarkan data dan fakta terkait strategi AVN dalam memberdayakan ekonomi pedesaan di Indonesia.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Studi Literatur: Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Studi literatur melibatkan penelaahan buku, catatan, laporan, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data akan diambil melalui informasi yang tersedia di internet, dokumen resmi dari Kementerian Desa PDTT RI, laporan kegiatan AVN, dan jurnal akademik yang terkait dengan AVN dan Kebijakan Ekonomi Politik Asean.

### **3. Jenis Data**

Data Sekunder: Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah catatan atau dokumentasi yang diterbitkan oleh perusahaan, publikasi pemerintah, analisis oleh media, situs web, internet, dan seterusnya. Peneliti menggunakan data sekunder karena telah banyak tersedia di internet dan lebih mudah didapatkan untuk keperluan penelitian.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis Kualitatif: Teknik analisis data yang akan digunakan adalah analisis kualitatif. Seluruh data yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan dianalisis lebih mendalam menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif membantu dalam mengidentifikasi strategi dan kebijakan ekonomi politik yang diimplementasikan oleh AVN serta menganalisis dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi dan politik pedesaan di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang pengaruh AVN dalam memberdayakan kebijakan ekonomi politik pedesaan di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi politik dari AVN kedepannya.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

**BAB 1 Pendahuluan** Bab pertama ini akan menjelaskan latar belakang permasalahan terkait kebijakan ekonomi politik pada *ASEAN Village Network (AVN)*. Dalam bab ini, akan dijelaskan tujuan dan manfaat penelitian, perumusan masalah, serta metode yang digunakan dalam penelitian. Selain itu,

bab ini juga akan memberikan gambaran tentang kerangka konsep yang menjadi dasar analisis serta sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini.

**BAB 2 Tinjauan Pustaka** Pada bab kedua, tinjauan literatur yang relevan dengan topik penelitian akan dipaparkan. Bab ini akan membahas teori-teori terkait kebijakan ekonomi politik internasional dan teori integrasi regional, serta konsep-konsep yang mendasari kebijakan ekonomi politik AVN. Selain itu, akan dibahas juga teori plural development serta referensi lainnya yang mendukung analisis dalam konteks regional ASEAN.

**BAB 3 Gambaran Umum** Bab ini akan memberikan gambaran umum mengenai implementasi *ASEAN Village Network* di Indonesia. Fokus utama akan berada pada konteks kebijakan ekonomi politik dari AVN dan partisipasi desa-desa di Sulawesi Selatan dalam program AVN. Bab ini juga akan menjelaskan secara garis besar mengenai kondisi infrastruktur, sumber daya manusia, kebijakan pemerintah, dan hubungan antar desa dalam lingkup AVN.

**BAB 4 Analisis dan Hasil Penelitian** Bab ini merupakan inti dari penelitian, di mana analisis mendalam dilakukan terhadap permasalahan yang diangkat. Bab ini akan terbagi ke dalam beberapa sub-bab. Pertama, analisis mengenai bagaimana pendekatan ekonomi politik dapat menjelaskan potensi optimalisasi pembangunan ekonomi desa melalui AVN di Sulawesi Selatan, termasuk bagaimana kebijakan ekonomi politik, seperti integrasi pasar, insentif fiskal, dan pengembangan infrastruktur desa, dapat mendukung akses

desa-desa ke pasar regional ASEAN. Kedua, pembahasan mengenai hambatan struktural dan politis, termasuk kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada desa-desa dalam AVN, yang menyebabkan rendahnya partisipasi serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi pedesaan. Bab ini juga akan mengeksplorasi implikasi kerja sama ekonomi melalui AVN terhadap integrasi desa dalam pasar tunggal ASEAN, khususnya dalam konteks kebijakan ekonomi politik regional.

**BAB 5 Kesimpulan** Bab ini akan merangkum hasil penelitian yang mencakup temuan-temuan utama terkait peran *ASEAN Village Network* dalam pemberdayaan ekonomi pedesaan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Kesimpulan ini juga akan membahas implikasi temuan penelitian terhadap kebijakan ekonomi politik yang relevan, seperti penguatan tata kelola pembangunan desa, integrasi pasar regional, dan akses ke sumber daya untuk pengembangan ekonomi desa. Selain itu, bab ini akan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan partisipasi desa-desa dalam AVN, dengan mempertimbangkan kebijakan pembangunan desa yang lebih inklusif dan mendorong sinergi antara aktor lokal, nasional, dan regional dalam kerangka integrasi ASEAN.

## BAB II

### Tinjauan Pustaka

#### 2.1 Kebijakan Ekonomi Politik Internasional

Dalam konteks Ekonomi Politik ASEAN Village Network (AVN), teori neofungsionalisme tidak hanya menjelaskan proses integrasi regional, tetapi juga relevan dalam memahami bagaimana kebijakan ekonomi dan politik dalam AVN berkembang serta berdampak pada dinamika kawasan ASEAN. Ekonomi politik internasional (EPI) dalam AVN mencakup berbagai aspek, seperti kebijakan perdagangan desa, investasi dalam pembangunan infrastruktur, keterlibatan aktor negara dan non-negara, serta dampak sosial-ekonomi dari kerja sama regional di tingkat desa (Ravenhill, 2020). Teori neofungsionalisme yang diperkenalkan oleh Ernst Haas menekankan bahwa kerja sama ekonomi yang dimulai dari satu sektor akan berdampak pada sektor lain melalui efek limpahan atau *spillover* (Haas, 1958). Dalam konteks AVN, *spillover* ekonomi terjadi ketika kebijakan pembangunan desa—seperti peningkatan infrastruktur dan pelatihan tenaga kerja—menciptakan kondisi yang lebih menguntungkan bagi perdagangan dan investasi lintas desa di negara-negara ASEAN (Nugroho, 2022).

Dengan semakin berkembangnya pasar desa, akan muncul kebutuhan untuk kebijakan yang lebih terintegrasi dalam hal perdagangan bebas bagi produk desa, regulasi investasi, serta mekanisme perlindungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa-desa ASEAN (ASEAN Secretariat, 2022). Selain itu, *spillover* politik juga terjadi ketika keterlibatan

aktor non-negara, seperti sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil, semakin meningkat dalam mendukung kebijakan pembangunan desa di ASEAN. Dalam ekonomi politik AVN, perusahaan-perusahaan swasta dan investor memiliki peran penting dalam mempercepat pembangunan ekonomi desa melalui berbagai bentuk kerja sama, seperti investasi dalam sektor pertanian, energi terbarukan, dan pariwisata berbasis komunitas (Hill, 2014). Peran aktor non-negara ini mencerminkan bagaimana integrasi ekonomi desa dalam AVN tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada dinamika pasar dan kerja sama dengan sektor bisnis.

Dari perspektif intervensi kebijakan ekonomi, pemerintah negara-negara ASEAN memiliki tanggung jawab dalam menciptakan regulasi yang mendukung konektivitas ekonomi antar-desa. AVN dapat mendorong negara-negara anggota untuk mengadopsi kebijakan yang lebih harmonis dalam subsidi pertanian desa, kemudahan akses pasar bagi produk desa, serta insentif bagi investor yang ingin berkontribusi pada pembangunan pedesaan (Rodrik, 2011). Dalam konteks ini, integrasi yang didorong oleh AVN tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi politik yang kuat, di mana pemerintah harus bernegosiasi dan bekerja sama dalam merancang kebijakan yang mendukung keberlanjutan program AVN di masing-masing negara.

Lebih lanjut, teori neofungsionalisme juga mengaitkan integrasi dengan peran lembaga supranasional, seperti ASEAN, yang bertindak sebagai fasilitator dalam proses harmonisasi kebijakan ekonomi desa di kawasan (Rosamond, 2000). Dalam ekonomi politik AVN, ASEAN dapat berperan

dalam mengkoordinasikan kebijakan investasi, menyediakan skema pendanaan bagi desa-desa yang tergabung dalam AVN, serta memastikan bahwa kebijakan ekonomi desa selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan ASEAN (ASEAN Secretariat, 2023). Ini menunjukkan bahwa AVN bukan hanya proyek pembangunan lokal, tetapi juga bagian dari strategi ekonomi politik yang lebih besar dalam mewujudkan integrasi ekonomi yang inklusif di ASEAN.

Dengan demikian, keterkaitan antara teori neofungsionalisme dan ekonomi politik AVN menunjukkan bagaimana pembangunan desa dalam kerangka AVN tidak hanya berdampak pada ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi pada integrasi ekonomi ASEAN secara keseluruhan. Proses *spillover* dalam aspek ekonomi dan politik yang terjadi dalam AVN menunjukkan bahwa integrasi regional tidak hanya dapat terjadi di tingkat negara, tetapi juga dapat dimulai dari akar rumput, dengan desa-desa sebagai pusat pertumbuhan dan konektivitas ekonomi yang lebih luas (Hettne & Soderbaum, 2000). Dalam implementasinya, AVN bergantung pada berbagai kebijakan nasional dan regional yang memengaruhi keberlanjutan dan efektivitas program ini, termasuk dalam bidang pembangunan ekonomi desa, investasi, perdagangan, keberlanjutan lingkungan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

### **1. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Desa dalam AVN**

Setiap negara anggota ASEAN memiliki kebijakan pembangunan desa yang berbeda, tetapi dalam konteks AVN, kebijakan ini harus

diselaraskan dengan tujuan kerja sama regional. Salah satu aspek utama adalah pemberian insentif ekonomi bagi desa yang tergabung dalam AVN. Pemerintah dapat memberikan subsidi, bantuan keuangan, atau kredit usaha mikro untuk mendukung pengembangan bisnis berbasis desa, seperti sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata (ASEAN Secretariat, 2022). Misalnya, pemerintah Indonesia memiliki program Dana Desa yang dapat diintegrasikan dengan AVN untuk mempercepat pembangunan desa dalam jejaring regional (Kemendesa, 2021). Selain itu, kebijakan dalam AVN juga mencakup pemberdayaan UMKM di pedesaan. Desa-desa yang tergabung dalam AVN didorong untuk meningkatkan kapasitas produksinya sehingga dapat menembus pasar ASEAN melalui program peningkatan akses ekspor bagi produk lokal (Nugroho, 2022). Dalam hal ini, kebijakan nasional di tiap negara berperan dalam menentukan regulasi ekspor dan impor barang desa, termasuk penyederhanaan prosedur perdagangan lintas negara agar produk desa dapat lebih mudah masuk ke pasar regional (Ravenhill, 2020).

## **2. Kebijakan Investasi dan Infrastruktur**

Pembangunan infrastruktur menjadi faktor kunci dalam keberhasilan AVN. Untuk memastikan desa-desa dalam AVN dapat berkembang secara ekonomi, diperlukan investasi dalam konektivitas transportasi, akses energi, dan digitalisasi (ADB, 2020). ASEAN, melalui mekanisme kerja sama regional, dapat mendorong investasi dari sektor

swasta dan lembaga keuangan internasional untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur yang menghubungkan desa-desa di berbagai negara anggota (ASEAN Connectivity 2025, 2016). Di beberapa negara ASEAN, kebijakan investasi desa telah mulai diperkenalkan dalam bentuk Public-Private Partnership (PPP), di mana pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta untuk membangun jalan desa, sistem irigasi, dan pusat logistik pedesaan (OECD, 2018). Selain itu, pengembangan desa digital menjadi kebijakan penting untuk memastikan desa-desa dalam AVN memiliki akses terhadap teknologi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi, seperti *e-commerce* desa dan digital banking bagi petani dan nelayan (World Bank, 2021).

### **3. Kebijakan Perdagangan dan Integrasi Pasar Desa**

Salah satu tantangan terbesar dalam AVN adalah menyelaraskan kebijakan perdagangan antarnegara ASEAN agar desa-desa dapat lebih mudah mengakses pasar regional. Saat ini, terdapat beberapa hambatan dalam perdagangan produk desa, seperti perbedaan standar produk, tarif impor-ekspor, dan regulasi sanitasi serta fitosanitasi yang membatasi ekspor produk pertanian dan kerajinan desa ke negara lain di ASEAN (ASEAN Trade Repository, 2023). Untuk mengatasi hambatan ini, kebijakan dalam AVN perlu mendorong harmonisasi standar produk desa di tingkat ASEAN, sehingga produk desa dapat lebih kompetitif di pasar regional (Chia, 2011). Misalnya, ASEAN dapat memperkenalkan

sertifikasi standar produk desa yang diakui di semua negara anggota, sehingga UMKM di pedesaan dapat lebih mudah memasarkan produknya ke negara lain tanpa harus menghadapi regulasi yang terlalu rumit (ASEAN Secretariat, 2022).

#### **4. Kebijakan Keberlanjutan Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Dalam konteks AVN, pembangunan desa yang berkelanjutan menjadi prioritas utama. ASEAN telah mengadopsi berbagai kebijakan terkait perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang dapat diintegrasikan ke dalam AVN, seperti *ASEAN Sustainable Development Goals (SDGs) Framework* dan *ASEAN Green Initiative* (ASEAN Secretariat, 2021). Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan desa dalam AVN tidak menyebabkan degradasi lingkungan, terutama dalam sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan (Hettne & Soderbaum, 2000). Sebagai contoh, kebijakan dalam AVN dapat mengadopsi pendekatan ekonomi hijau, di mana desa-desa didorong untuk menggunakan energi terbarukan, mengembangkan pertanian organik, dan menerapkan praktik perikanan berkelanjutan (UNESCAP, 2020). Selain itu, kebijakan pengelolaan air dan limbah juga harus menjadi bagian dari AVN agar pembangunan ekonomi desa tidak merusak lingkungan sekitar (ASEAN State of Environment Report, 2022).

## **5. Kebijakan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pendidikan**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa-desa ASEAN menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan AVN. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi masyarakat desa perlu mendapat perhatian. Beberapa negara ASEAN telah memiliki program pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan berbasis desa, tetapi dalam konteks AVN, kebijakan ini perlu diperluas agar melibatkan kerja sama antarnegara dalam pertukaran tenaga kerja terampil di sektor pertanian, pariwisata, dan industri kreatif desa (ILO, 2021). Sebagai contoh, desa-desa yang tergabung dalam AVN dapat mengadakan program pelatihan bersama yang melibatkan tenaga ahli dari berbagai negara ASEAN untuk meningkatkan keterampilan masyarakat desa dalam bidang agribisnis, teknologi pangan, dan ekowisata (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint, 2025). Selain itu, kebijakan pemerintah juga dapat mendorong akses pembiayaan pendidikan bagi pemuda desa, sehingga mereka dapat memiliki keterampilan yang lebih baik untuk mengelola dan mengembangkan potensi desa mereka dalam jejaring AVN (UNDP, 2023).

Kebijakan dalam AVN mencerminkan pendekatan multidimensional dalam pembangunan desa yang mencakup aspek ekonomi, investasi, perdagangan, lingkungan, dan pendidikan.

Keselarasan kebijakan antara tingkat nasional dan regional menjadi tantangan utama dalam memastikan AVN dapat berjalan secara efektif dan memberikan manfaat bagi seluruh desa yang tergabung di dalamnya (ASEAN Secretariat, 2021). Oleh karena itu, keberhasilan AVN sangat bergantung pada bagaimana ASEAN dan negara-negara anggotanya dapat mengharmonisasikan kebijakan, mendorong investasi yang inklusif, memperkuat konektivitas perdagangan, serta memastikan keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan desa-desa ASEAN.

ASEAN Village Network (AVN) tidak hanya merupakan inisiatif pembangunan desa, tetapi juga berperan dalam dinamika Ekonomi Politik Internasional (EPI) di kawasan ASEAN. Dalam konteks ekonomi politik, AVN dapat dipahami sebagai bagian dari strategi regional yang bertujuan untuk memperkuat interdependensi ekonomi antarnegara ASEAN melalui pembangunan desa berbasis komunitas (Ravenhill, 2020). Program ini mencerminkan bagaimana kebijakan ekonomi desa tidak hanya ditentukan oleh faktor domestik, tetapi juga oleh interaksi antara negara, pasar, dan institusi regional (Gilpin, 2001).

Salah satu peran utama AVN dalam ekonomi politik ASEAN adalah sebagai instrumen diplomasi ekonomi yang memperkuat kerja sama antarnegara di tingkat akar rumput. Melalui AVN, negara-negara ASEAN dapat menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan inklusif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing desa dalam perekonomian regional

(ASEAN Secretariat, 2022). Selain itu, AVN juga berfungsi sebagai mekanisme untuk memperdalam integrasi pasar regional, di mana desa-desa yang tergabung dalam jaringan ini memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pasar ASEAN. Dengan adanya konektivitas yang lebih baik, produk-produk desa seperti hasil pertanian, kerajinan, dan pariwisata dapat lebih mudah dipasarkan di tingkat regional, mendukung kebijakan perdagangan bebas ASEAN seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) (Chia, 2013).

Dari perspektif investasi, AVN juga berperan dalam menarik Penanaman Modal Asing (PMA) dan mendorong alih teknologi ke desa-desa di ASEAN. Dengan adanya investasi di sektor pertanian, ekowisata, dan industri kreatif berbasis desa, AVN dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi di tingkat lokal (World Bank, 2020). Alih teknologi yang diperoleh dari kerja sama dengan negara lain di ASEAN dapat membantu desa-desa mengembangkan sistem produksi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Selain itu, dorongan terhadap digitalisasi ekonomi desa, seperti melalui pelatihan e-commerce dan peningkatan akses internet, sejalan dengan agenda ASEAN dalam mengembangkan Smart Villages (ASEAN Smart Village Strategy, 2021).

Di sisi lain, AVN juga memainkan peran penting dalam membangun ketahanan ekonomi desa, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti krisis pangan dan perubahan iklim. Dengan memperkuat sektor ekonomi berbasis komunitas, AVN dapat menjadi bagian dari strategi ASEAN untuk

menjaga stabilitas pangan dan mengurangi ketergantungan desa terhadap impor komoditas dari luar kawasan (FAO, 2022). Pembangunan desa yang berorientasi pada ekonomi hijau dan ekowisata juga dapat memperkuat daya tahan ekonomi desa terhadap guncangan eksternal, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi prioritas ASEAN (UNDP, 2019).

Dengan demikian, AVN bukan hanya sekadar program pembangunan desa, tetapi juga berperan dalam memperkuat fondasi ekonomi politik ASEAN melalui diplomasi ekonomi, integrasi pasar, investasi, serta ketahanan ekonomi desa. Peran ini menunjukkan bahwa pembangunan desa dalam AVN tidak terlepas dari dinamika regional yang lebih luas, di mana desa-desa di ASEAN semakin terhubung dalam struktur ekonomi regional yang saling bergantung (Beeson, 2009).

Selain itu, peran kelembagaan dalam AVN juga menjadi aspek penting dalam ekonomi politik regional. ASEAN sebagai organisasi regional memiliki berbagai mekanisme yang mendukung pembangunan desa melalui kebijakan dan kerja sama multilateral. Misalnya, ASEAN Economic Community (AEC) mendorong pengurangan hambatan perdagangan dan peningkatan konektivitas infrastruktur, yang dapat dimanfaatkan desa-desa dalam AVN untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal (ASEAN Economic Community Blueprint, 2025). Keberadaan AVN dapat menjadi bukti bahwa pembangunan desa bukan hanya isu domestik, tetapi juga bagian dari agenda ekonomi politik yang lebih besar di tingkat kawasan.

Dari sudut pandang regulasi dan tata kelola, AVN juga menghadapi tantangan dalam harmonisasi kebijakan antarnegara. Perbedaan kebijakan ekonomi dan standar regulasi di masing-masing negara ASEAN dapat menjadi hambatan dalam upaya mengintegrasikan ekonomi desa di tingkat regional (Sohn, 2018). Oleh karena itu, peran AVN dalam memfasilitasi dialog kebijakan antarnegara menjadi sangat krusial. Selain itu, partisipasi aktor non-negara, seperti organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi, juga dapat memperkuat efektivitas kebijakan AVN. Model tata kelola yang inklusif ini dapat menciptakan sinergi antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan komunitas desa, memastikan bahwa pembangunan desa dalam kerangka AVN tetap berkelanjutan dan sesuai dengan kondisi lokal (Keohane & Nye, 2001).

Lebih jauh, AVN juga dapat dikaji dalam konteks keamanan ekonomi regional, terutama dalam memastikan bahwa desa-desa di ASEAN tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang dalam menghadapi tantangan global. Ketergantungan desa pada sektor pertanian dan UMKM sering kali membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga global, perubahan iklim, dan krisis ekonomi (OECD, 2021). Dengan adanya AVN, ASEAN dapat menciptakan jaringan ketahanan ekonomi yang memungkinkan desa-desa saling berbagi sumber daya, teknologi, dan praktik terbaik dalam menghadapi tantangan ini secara kolektif. Inisiatif seperti peningkatan akses ke pasar digital, program keuangan inklusif bagi petani dan UMKM desa, serta penguatan sistem logistik regional dapat menjadi solusi konkret dalam meningkatkan daya tahan ekonomi desa terhadap faktor eksternal.

Selain aspek ekonomi, AVN juga memiliki dampak sosial dan budaya yang erat kaitannya dengan ekonomi politik. Pertukaran pengetahuan antardesa di ASEAN tidak hanya terbatas pada praktik ekonomi, tetapi juga mencakup budaya lokal, model tata kelola komunitas, serta inovasi sosial (Sen, 2020). Hal ini menciptakan identitas regional yang lebih kuat dan memperkuat solidaritas antarnegara ASEAN. Peningkatan interaksi dan kolaborasi dalam AVN juga berpotensi memperkecil kesenjangan ekonomi antardesa di negara-negara ASEAN, sehingga mendukung tujuan ASEAN untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih merata dan inklusif.

Pada akhirnya, keberhasilan AVN sebagai bagian dari ekonomi politik regional ASEAN sangat bergantung pada keberlanjutan kebijakan, komitmen antarnegara, serta partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan berbasis pada prinsip integrasi ekonomi yang inklusif, AVN dapat menjadi model pembangunan desa yang tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi ASEAN secara keseluruhan (ASEAN Secretariat, 2023).

## **2.2 Integrasi Regional dalam Asean Village Network**

Integrasi regional adalah proses kerja sama antarnegara dalam suatu kawasan untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dalam konteks ASEAN, integrasi ini dilakukan melalui berbagai inisiatif, salah satunya ASEAN Economic Community (AEC) yang bertujuan untuk menciptakan pasar dan basis produksi yang terintegrasi. Salah satu bentuk implementasi integrasi di tingkat lokal adalah ASEAN Village

Network (AVN), yang menghubungkan desa dan kelurahan di negara-negara ASEAN guna meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis komunitas.

Dalam teori integrasi regional, neofungsionalisme menawarkan perspektif bahwa integrasi ekonomi dapat dimulai dari sektor-sektor spesifik, kemudian menghasilkan efek limpahan (*spillover effect*) ke sektor lain. Menurut Schmitter (2005), integrasi tidak hanya terjadi di tingkat negara, tetapi juga di tingkat lokal melalui kerja sama lintas batas dalam bidang ekonomi dan sosial. AVN mencerminkan prinsip ini dengan memfasilitasi pertukaran praktik terbaik antar komunitas desa dan kelurahan di ASEAN, mendorong investasi berbasis lokal, serta meningkatkan konektivitas ekonomi antarwilayah pedesaan.

Selain itu, teori pembangunan berkelanjutan juga relevan dalam membahas peran AVN dalam integrasi regional. Sachs (2015) menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan harus berbasis pada kebutuhan lokal dan melibatkan komunitas sebagai aktor utama. AVN mendukung pendekatan ini dengan memberdayakan desa dan kelurahan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kerja sama ekonomi berbasis komunitas, serta peningkatan akses terhadap teknologi dan pasar regional. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi lokal, tetapi juga mendukung visi ASEAN dalam menciptakan pembangunan yang merata di seluruh kawasan.

Dari perspektif integrasi regional, AVN berperan sebagai mekanisme yang mempercepat pembangunan ekonomi desa dan kelurahan, sekaligus memperkuat keterhubungan ekonomi antarnegara ASEAN. Dengan

mengedepankan prinsip kerja sama berbasis komunitas dan pembangunan berkelanjutan, AVN berpotensi menjadi instrumen yang tidak hanya mempercepat integrasi ekonomi regional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.

Integrasi regional ASEAN tidak hanya melibatkan kerja sama antarnegara, tetapi juga mencakup inisiatif berbasis komunitas seperti ASEAN Village Network (AVN). Program ini berfungsi sebagai mekanisme untuk memperkuat keterkaitan ekonomi desa dan kelurahan dengan pasar regional ASEAN, sekaligus mendorong pembangunan inklusif di tingkat lokal.

Salah satu aspek spesifik yang menunjukkan bagaimana AVN menjadi bagian dari proses integrasi regional adalah pendekatan *micro-regionalism*, yang menekankan pentingnya aktor non-negara dalam proses integrasi (Söderbaum, 2016). Dalam konteks ini, desa dan kelurahan yang tergabung dalam AVN bertindak sebagai entitas ekonomi yang memperkuat perdagangan antar komunitas, alih teknologi, serta pertukaran praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya lokal. Hal ini menciptakan sebuah bentuk integrasi yang tidak hanya terjadi di tingkat negara, tetapi juga di tingkat komunitas yang lebih kecil, sehingga mendukung integrasi ekonomi ASEAN dari bawah ke atas.

Selain itu, AVN juga berperan dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas (*community-based economy*) di ASEAN. Menurut Putnam (1993), modal sosial yang kuat dalam suatu komunitas dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan dan kerja sama ekonomi. Dengan menghubungkan

desa-desa dan kelurahan dalam satu jaringan kerja sama, AVN menciptakan mekanisme di mana komunitas dapat mengakses sumber daya, investasi, dan peluang perdagangan yang lebih luas dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dengan demikian, AVN mendukung integrasi ASEAN dengan memastikan bahwa manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh sektor industri dan perkotaan tetapi juga oleh masyarakat pedesaan.

Dari sisi kebijakan, AVN juga sejalan dengan pendekatan *ASEAN Way*, yang menekankan prinsip konsultasi dan konsensus dalam kerja sama kawasan. Melalui AVN, desa dan kelurahan di ASEAN dapat bekerja sama secara fleksibel tanpa harus terikat pada perjanjian yang terlalu mengikat, memungkinkan kerja sama yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal. Model ini memperkuat hubungan antar masyarakat tanpa harus mengorbankan kedaulatan negara, yang menjadi salah satu prinsip utama dalam integrasi ASEAN.

Dengan kata lain, AVN memperkaya model integrasi regional ASEAN dengan memasukkan elemen kerja sama berbasis komunitas, ekonomi mikro, serta fleksibilitas dalam implementasi kebijakan. Hal ini menjadikannya sebagai contoh nyata bagaimana integrasi kawasan tidak hanya berlangsung melalui kebijakan makro tetapi juga melalui inisiatif yang lebih dekat dengan masyarakat.

Integrasi regional dalam konteks ASEAN memiliki relevansi yang kuat dengan *ASEAN Village Network* (AVN) karena inisiatif ini merupakan bagian dari strategi besar ASEAN dalam memperkuat kerja sama ekonomi dan sosial

di tingkat akar rumput. AVN tidak hanya berfokus pada pembangunan desa secara individual, tetapi juga membangun jaringan antar desa dan kelurahan di berbagai negara ASEAN, menciptakan sinergi dalam pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Dengan demikian, AVN berkontribusi langsung dalam mewujudkan tujuan *ASEAN Economic Community* (AEC) yang bertujuan untuk menciptakan kawasan ekonomi yang lebih terintegrasi dan inklusif.

Sebagai mekanisme integrasi regional, AVN menyediakan platform bagi desa dan kelurahan untuk bertukar pengalaman, berbagi praktik terbaik dalam pembangunan ekonomi lokal, serta membangun kemitraan strategis dengan komunitas lain di kawasan ASEAN. Dengan adanya kerja sama ini, desa dan kelurahan yang tergabung dalam AVN dapat memperoleh akses terhadap teknologi, inovasi, serta peluang pasar yang lebih luas di tingkat regional. Dalam jangka panjang, hal ini berkontribusi dalam meningkatkan daya saing ekonomi desa, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah di ASEAN.

Selain aspek ekonomi, AVN juga memiliki dampak signifikan dalam mempererat hubungan sosial dan budaya antar masyarakat ASEAN. Program ini mendorong penguatan komunitas desa dan kelurahan melalui berbagai kegiatan seperti pengembangan pariwisata berbasis komunitas, pelestarian budaya lokal, dan program pendidikan lintas negara. Dengan demikian, AVN tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, tetapi juga memperkuat identitas regional ASEAN melalui interaksi sosial yang lebih erat di tingkat akar rumput.

Dari segi kebijakan, keberadaan AVN mendukung upaya pemerintah negara-negara ASEAN dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Melalui berbagai inisiatif yang dijalankan dalam AVN, desa dan kelurahan tidak hanya menerima bantuan teknis dan finansial, tetapi juga terlibat dalam proses perumusan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif. Hal ini mencerminkan pendekatan bottom-up dalam integrasi regional, di mana komunitas lokal diberikan peran yang lebih aktif dalam menentukan arah pembangunan ekonomi dan sosial mereka sendiri.

Lebih jauh, AVN juga memainkan peran penting dalam meningkatkan ketahanan desa terhadap tantangan global, seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan digitalisasi ekonomi. Melalui jaringan ini, desa-desa dapat mengadopsi teknologi ramah lingkungan, menerapkan sistem pertanian berkelanjutan, serta meningkatkan literasi digital masyarakat desa. Dengan adanya keterhubungan ini, AVN tidak hanya berfungsi sebagai alat pembangunan desa, tetapi juga sebagai instrumen dalam memperkuat ketahanan ASEAN secara keseluruhan.

Sebagai kesimpulan, ASEAN Village Network merupakan bagian penting dari upaya ASEAN dalam memperdalam integrasi regional melalui pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di tingkat desa dan kelurahan. Dengan menyediakan platform bagi kerja sama lintas batas di tingkat lokal, AVN tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat fondasi ASEAN sebagai komunitas yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.

## **2.3 AVN sebagai Instrumen Pembangunan Desa dalam Kerangka Kerja**

### **Sama Integrasi Regional ASEAN**

Selain menjadi instrumen integrasi kawasan, ASEAN Village Network (AVN) juga mencerminkan dinamika ekonomi politik internasional yang beroperasi dalam konteks kerja sama regional. Dalam kerangka ini, pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari relasi kuasa antara aktor negara dan non-negara, distribusi sumber daya, serta arah kebijakan yang ditentukan oleh struktur ekonomi global maupun regional. AVN memperlihatkan bagaimana kepentingan politik dan ekonomi negara-negara anggota ASEAN berinteraksi untuk menghasilkan bentuk kerja sama yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga operasional di tingkat akar rumput. Inisiatif ini muncul dari kebutuhan politik untuk memperkuat kohesi regional serta tuntutan ekonomi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Dengan kata lain, AVN menjadi manifestasi dari proses ekonomi politik, di mana desa diposisikan sebagai bagian dari strategi regional untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif, stabilitas sosial, dan legitimasi politik ASEAN di mata warganya sendiri.

Dalam pendekatan ekonomi politik internasional, aktor-aktor negara tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku dominan dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Justru, kebijakan dalam AVN menunjukkan bagaimana aktor lokal seperti komunitas desa, kepala desa, koperasi, hingga pelaku UMKM diberi peran penting sebagai entitas yang aktif dalam mendorong transformasi ekonomi. Kegiatan seperti pertukaran praktik pertanian berkelanjutan, inovasi

desa digital, dan promosi pariwisata berbasis komunitas adalah bentuk konkret bagaimana AVN membentuk arsitektur kerja sama yang lebih partisipatif dan mengaburkan batas antara lokal dan regional. AVN pada dasarnya mendorong terciptanya bentuk ekonomi politik baru yang berfokus pada inklusi sosial dan penguatan ekonomi lokal, sebagai antitesis dari pendekatan liberal murni yang hanya menekankan pada efisiensi pasar dan pertumbuhan berbasis kota besar.

Selain itu, dalam konteks distribusi sumber daya, AVN juga dapat dianalisis sebagai upaya untuk menciptakan aliran sumber daya non-finansial yang bersifat lintas batas negara, seperti transfer teknologi tepat guna, pertukaran kapasitas kelembagaan desa, dan penguatan literasi digital bagi masyarakat desa. Mekanisme ini menciptakan sistem redistribusi yang lebih setara antarnegara ASEAN, terutama antara negara dengan desa-desa yang sudah maju dan yang masih tertinggal. Di sinilah aspek ekonomi politiknya terlihat jelas—bahwa pembangunan melalui AVN tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menyangkut siapa yang mendapatkan manfaat, siapa yang mengakses jaringan kerja sama, dan bagaimana posisi tawar desa dalam struktur kekuasaan regional dibentuk melalui kebijakan bersama.

Lebih jauh lagi, dalam perspektif ekonomi politik, AVN juga berfungsi sebagai alat diplomasi sosial ASEAN yang memperluas fungsi kebijakan luar negeri menjadi lebih berbasis masyarakat (*people-centered diplomacy*). Negara-negara ASEAN dalam hal ini menggunakan AVN untuk membangun citra politik yang progresif dan responsif terhadap isu-isu sosial seperti

ketimpangan wilayah, kemiskinan, dan keterbelakangan infrastruktur desa. Hal ini sangat relevan dengan pendekatan ekonomi politik kontemporer yang menekankan pentingnya legitimasi dan responsivitas kebijakan dalam menciptakan stabilitas politik domestik dan kawasan. Dalam praktiknya, negara-negara anggota ASEAN yang terlibat aktif dalam AVN dapat meningkatkan pengaruh diplomatik mereka, memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral, serta memanfaatkan AVN sebagai saluran untuk mencapai target pembangunan nasional melalui pendekatan regional.

Keterlibatan aktor non-negara dalam AVN seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga donor, universitas, dan sektor swasta juga tidak bisa dilepaskan dari kajian ekonomi politik. Mereka menjadi bagian dari ekosistem kebijakan AVN yang memperlihatkan dinamika negosiasi kepentingan antara pelaku lokal dan supranasional. Misalnya, peran universitas dalam memberikan pelatihan dan riset, peran NGO dalam memberdayakan kelompok rentan, atau peran swasta dalam membuka pasar produk desa di tingkat ASEAN, adalah contoh nyata bagaimana aktor-aktor ini ikut mempengaruhi arah pembangunan melalui jejaring AVN. Relasi kekuasaan dan sumber daya antara aktor-aktor ini turut membentuk hasil akhir dari program pembangunan di desa, sehingga penting dianalisis secara kritis dalam kerangka ekonomi politik.

Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa AVN bukan sekadar platform kerja sama teknis atau simbolik, melainkan ruang politik-ekonomi baru yang kompleks. AVN tidak hanya mempertemukan desa-desa di ASEAN

dalam semangat solidaritas, tetapi juga menghadirkan arena negosiasi kepentingan ekonomi, pembentukan norma kebijakan, dan pertarungan ideologi pembangunan—antara pertumbuhan ekonomi versus keadilan sosial, antara efisiensi versus inklusivitas, serta antara negara sebagai pusat kendali versus masyarakat lokal sebagai pelaku utama pembangunan. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi politik sangat relevan dan signifikan untuk menganalisis bagaimana AVN dijalankan, dikembangkan, dan diarahkan ke masa depan sebagai bagian dari upaya ASEAN mewujudkan kawasan yang terintegrasi, adil, dan berkelanjutan dari bawah ke atas (*bottom-up integration*).

Selain itu, keberadaan AVN juga mencerminkan bagaimana kebijakan pembangunan di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi politik di tingkat regional. Negara-negara anggota ASEAN memiliki kepentingan berbeda terkait pembangunan pedesaan, yang dapat mempengaruhi arah program AVN dan pelibatan desa-desa tertentu (ASEAN, 2023a). Dalam hal ini, AVN juga menjadi arena kontestasi kebijakan, di mana negara-negara yang memiliki kapasitas kelembagaan dan sumber daya lebih besar cenderung lebih aktif dan dominan dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan program (Fawcett & Hurrell, 1995). Desa-desa dari negara anggota yang lebih maju mungkin memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya, pelatihan, dan infrastruktur pendukung, dibandingkan dengan desa-desa dari negara anggota yang tertinggal secara ekonomi atau geografis. Ketimpangan ini, meskipun tidak eksplisit, menunjukkan adanya relasi kuasa

dalam jaringan kerja sama yang pada akhirnya membentuk struktur ekonomi politik AVN.

Lebih jauh, AVN membuka ruang untuk keterlibatan aktor non-negara dalam desain dan pelaksanaan kebijakan pembangunan desa. Organisasi internasional, sektor swasta, hingga LSM turut terlibat dalam memberikan dukungan teknis maupun pendanaan (ASEAN, 2023b). Keberadaan aktor-aktor ini turut memengaruhi arah pembangunan desa, karena masing-masing membawa agenda dan nilai tersendiri yang kadang tidak sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan lokal. Dalam perspektif ekonomi politik, ini menandakan bahwa pembangunan desa dalam AVN tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh kepentingan eksternal, melainkan menjadi produk negosiasi antara aktor lokal dan transnasional (Hettne, 2005). Hal ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan pembangunan tidak netral secara politik, melainkan dipenuhi dengan kepentingan yang saling bersaing.

Kemudian, dalam praktiknya, AVN juga menghadirkan persoalan mengenai keberlanjutan pendanaan dan koordinasi antarlevel pemerintahan. Di banyak kasus, desa-desa yang terlibat dalam jejaring AVN masih sangat bergantung pada dukungan dari pemerintah pusat atau lembaga internasional (Bappenas, 2022). Ketergantungan ini bisa menjadi hambatan ketika tidak ada kesinambungan kebijakan atau perubahan prioritas dalam politik nasional. Dalam konteks ekonomi politik, ini menunjukkan bagaimana struktur fiskal dan tata kelola memengaruhi efektivitas program kerja sama regional di tingkat lokal. Selain itu, adanya kerangka institusional ASEAN yang masih bersifat

longgar dan tidak mengikat secara hukum (non-binding), menyebabkan implementasi AVN sangat bergantung pada komitmen sukarela masing-masing negara anggota, yang rentan berubah tergantung dinamika politik domestik (Stubbs, 2000).

Akhirnya, AVN dapat dilihat sebagai arena ekonomi politik yang kompleks, di mana pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh kebijakan teknokratik, tetapi juga oleh dinamika kekuasaan, sumber daya, dan kepentingan yang melintasi batas negara. Meskipun bertujuan untuk pemerataan dan pemberdayaan, pelaksanaan AVN tetap harus dikritisi secara objektif agar tidak justru mereproduksi ketimpangan baru dalam bentuk keterpilihan desa yang terbatas, ketimpangan kapasitas antardesa, dan bias dalam distribusi manfaat. Oleh karena itu, analisis ekonomi politik menjadi penting untuk memahami tidak hanya *apa* yang dilakukan AVN, tetapi juga *siapa* yang diuntungkan, *bagaimana* kebijakan itu terbentuk, dan *mengapa* bentuk kerja sama tersebut dipilih dalam kerangka pembangunan regional ASEAN (Scholte, 2005).

## **2.4 Penelitian Terdahulu**

Dalam menunjang penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam memahami ASEAN Village Network (AVN) dari berbagai perspektif. Salah satu penelitian yang cukup signifikan adalah tulisan berjudul "*Village Development and Regional Cooperation: The Emerging Role of ASEAN Village Network*" oleh Nurul Izzati et al. (2023) yang dimuat dalam *Journal of Southeast Asian Development*

*Studies*. Penelitian ini membahas peran AVN sebagai sarana baru kerja sama pembangunan desa di Asia Tenggara dengan menekankan aspek sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen resmi ASEAN. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan konsep *New Regionalism* yang diperkenalkan oleh Hettne dan Söderbaum (2000), dengan menyoroti pentingnya integrasi dari bawah (*bottom-up*) yang melibatkan komunitas lokal sebagai aktor utama dalam kerja sama kawasan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa AVN memberikan ruang kolaboratif bagi desa-desa di kawasan ASEAN untuk saling berbagi praktik terbaik, mengakses pelatihan, serta meningkatkan kapasitas ekonomi lokal melalui promosi UMKM dan digitalisasi. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan seperti ketimpangan kapasitas antar desa, keterbatasan pendanaan, serta belum optimalnya keterlibatan komunitas lokal dalam perencanaan kebijakan AVN. Kesimpulan yang ditarik oleh peneliti menyatakan bahwa keberhasilan AVN sangat tergantung pada sinergi antara kebijakan nasional, komitmen pemerintah lokal, serta keberdayaan institusi desa.

Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai relevansi dan kontribusi berbagai penelitian terdahulu terhadap kajian ini, berikut disajikan tabel yang merangkum peneliti dan judul penelitian, kerangka teori yang digunakan, serta temuan utama dari masing-masing studi. Tabel ini menunjukkan bahwa ASEAN Village Network (AVN) telah dikaji dari

beragam perspektif teoretis seperti *New Regionalism*, *Teori Pembangunan Lokal*, *Teori Modernisasi*, dan *Teori Partisipasi Komunitas*. Namun demikian, belum banyak kajian yang menghubungkan AVN secara eksplisit dengan pendekatan *Ekonomi Politik Internasional* serta *Integrasi Regional* dalam konteks ASEAN. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi unik dengan menawarkan pendekatan tersebut untuk menganalisis bagaimana AVN tidak hanya sebagai proyek pembangunan desa, tetapi juga sebagai instrumen integrasi ekonomi dan politik di tingkat kawasan.

**Tabel 1 Perbandingan Antara 5 Penelitian Terdahulu**

| Peneliti & Judul Penelitian                                                                                          | Kerangka Teori                                     | Temuan Utama                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nurul Izzati et al. (2023), Village Development and Regional Cooperation: The Emerging Role of ASEAN Village Network | New Regionalism (Hettne & Söderbaum)               | AVN berperan dalam kolaborasi pembangunan desa melalui promosi UMKM, pelatihan, dan digitalisasi. Tantangan utama meliputi ketimpangan kapasitas desa dan pendanaan.                                                                            |
| Siti Komariah (2022), Peran ASEAN dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal melalui ASEAN Village Network                     | Teori Pembangunan Lokal                            | AVN dipandang mampu memperkuat ketahanan ekonomi desa melalui jejaring kerja sama desa lintas negara, namun efektivitasnya masih bergantung pada dukungan kebijakan nasional.                                                                   |
| Ahmad Yanuar (2021), Digitalisasi Desa dalam Rangka Integrasi Kawasan ASEAN                                          | Teori Modernisasi                                  | Digitalisasi melalui AVN membuka peluang integrasi digital desa, tetapi belum merata karena keterbatasan infrastruktur dan literasi teknologi di sebagian besar desa.                                                                           |
| Maria Lestari (2020), Kolaborasi Antar Desa ASEAN dan Peningkatan Kapasitas Sosial                                   | Teori Partisipasi Komunitas                        | AVN meningkatkan konektivitas sosial dan budaya antar desa ASEAN, namun masih terdapat kesenjangan partisipasi antar komunitas.                                                                                                                 |
| Penelitian ini, Analisis Ekonomi Politik dalam ASEAN Village Network (AVN)                                           | Ekonomi Politik Internasional & Integrasi Regional | Avn dianalisis sebagai instrument integrasi ekonomi ASEAN dari tingkat akar rumput. Penelitian ini menyoroti relasi kekuasaan, ketimpangan distribusi sumber daya, dan kepentingan ekonomi-politik dalam konteks pembangunan desa di Indonesia. |

(Sumber: Dari Berbagai Sumber dan Disusun Kedalam Tabel Oleh Penulis)

Jika dibandingkan dengan penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan yang mendasar. Pertama, dari sisi fokus kajian, penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek pembangunan sosial dan partisipasi komunitas, sedangkan penelitian ini mengambil pendekatan ekonomi politik internasional untuk melihat bagaimana AVN menjadi instrumen kebijakan yang melibatkan relasi kekuasaan, distribusi sumber daya, serta kepentingan ekonomi dalam

konteks regional ASEAN. Kedua, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori integrasi regional dalam kerangka ekonomi politik, yang lebih menekankan pada proses penguatan ekonomi dari bawah dan peran kebijakan dalam menciptakan kesalingterhubungan kawasan.

Selain itu, penelitian ini lebih fokus pada konteks Indonesia dengan menelaah pelaksanaan AVN secara spesifik di desa-desa yang tergabung dalam program ini seperti Desa Namang dan Desa Taro. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam melihat AVN bukan hanya sebagai proyek pembangunan desa, melainkan sebagai bagian dari strategi integrasi ekonomi kawasan yang diinisiasi dari tingkat lokal melalui kebijakan regional ASEAN.

Selain itu, penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan kajian yang menghubungkan program ASEAN Village Network dengan pendekatan ekonomi politik internasional, khususnya dalam melihat bagaimana kebijakan regional seperti AVN mencerminkan dinamika kekuasaan, ketimpangan akses sumber daya, dan arah pembangunan ekonomi desa dalam kerangka integrasi regional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah implementasi AVN sebagai kebijakan pembangunan, tetapi juga menempatkannya dalam konteks yang lebih luas mengenai strategi ekonomi kawasan dan posisi tawar negara berkembang dalam arsitektur ekonomi ASEAN.